

**KINERJA APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI  
COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

RIO PUTRA PARDEDE

NPP. 29.1819

*Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua*

*Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*

Email: rioputra123452@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *In Sumedang Regency, the number of cases affected by the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is still very high because the people in Sumedang Regency who still have not heeded the warnings and recommendations regarding the observance of the importance of implementing health protocols, causing the Sumedang Regent to issue a policy regulated in the Sumedang Regent Regulation. Number 5 of 2021 concerning the Imposition of Administrative Sanctions Against Health Order Violations in the Implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and the Adaptation of New Habits in Combating the 2019 CORONA VIRUS DISEASE in Sumedang Regency. The Sumedang Regency Civil Service Police Unit is a regional government organization that has the responsibility to assist regional heads in enforcing regional regulations and maintaining public peace and public order. Therefore, it is urgently needed for officials who have high performance in implementing policies to control health protocols during the COVID-19 pandemic.*

**Purpose:** *The writing of this thesis was carried out with the aim of being able to find out about how the performance of the Civil Service Police Unit (SATPOL-PP) in implementing health protocol control policies during the COVID-19 pandemic in Sumedang Regency.*

**Method:** *The research method used by the author is a qualitative research method with an inductive approach. Where the data collection techniques used are observation, interviews and documentation as well as in analyzing the data using the triangulation technique.*

**Result:** *Based on the results obtained by the authors while conducting the research, the authors know that the performance of the Civil Service Police Unit Apparatus in controlling health protocols during the COVID-19*

pandemic in Sumedang Regency has been running well so far despite several obstacles. **Conclusion:** Such as service quality, responsiveness, responsibility and accountability have been running optimally which is influenced by several factors, namely communication, disposition and bureaucratic structure that can support the achievement of performance so that it can run well and optimally.

**Keywords:** Apparatus, Controlling Health Protocol

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Di Kabupaten Sumedang angkut yang terkena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masih sangat tinggi dikarenakan masyarakat di Kabupaten Sumedang yang masih belum mengindahkan teguran dan anjuran terkait ketaatan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan, menyebabkan Bupati Sumedang mengeluarkan suatu kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan CORONA VIRUS DISEASE 2019 di Kabupaten Sumedang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang merupakan organisasi Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah serta memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Maka dari itu sangat dibutuhkan para aparatur yang mempunyai kinerja tinggi dalam melaksanakan kebijakan penertiban protokol kesehatan di masa pandemik COVID-19. **Tujuan:** Penulisan Skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui tentang bagaimana kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) dalam melaksanakan kebijakan penertiban protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumedang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi serta dalam menganalisis data menggunakan teknik triangulasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis selama melaksanakan penelitian, penulis mengetahui bahwa kinerja dari Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban protokol kesehatan pada

masa pandemik COVID-19 di Kabupaten Sumedang selama ini sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala. **Kesimpulan:** Seperti kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas sudah berjalan dengan maksimal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang dapat mendukung tercapainya kinerja agar dapat berjalan baik dan secara maksimal.

**Kata Kunci :** Aparatur, Penertiban Protokol Kesehatan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan otonomi daerah yang menjadi hak, kewajiban serta kewenangan dari pemerintahan daerah guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri. Pada pasal 12 huruf (e) yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat. Setiap pemerintah daerah memiliki suatu perangkat daerah yang membantu menjalankan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang memiliki tanggung jawab serta tugas di bagian keamanan dan ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memiliki tugas pokok yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam pasal 5 yaitu, menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan menyelenggarakan ketentraman. Sebagai organisasi yang berada dalam perangkat pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sangatlah berperang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam menangani dan menindak segala bentuk penyelewengan dan pelanggaran hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja terkait tugas pokok serta uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam pasal 3 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seseorang Kepala yang disebut sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tugas pokok untuk membantu Bupati (Kepala Daerah) guna menjalankan otonomi daerah sektor ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) serta penegakan Perundang-Undang Daerah.

Peran dari organisasi pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan sangat penting untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum). Dimana Kinerja dari aparatur Satuan Polisi Pamong Praja haruslah ditingkatkan lagi karena

seluruh negara tidak terkecuali negara Indonesia dilanda wabah penyakit menular yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Kasus penyebaran virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi merupakan virus yang menyebabkan terjadinya pandemi global. Virus ini merupakan wabah penyakit yang disebabkan oleh jenis virus baru yaitu Sars-CoV-2 dimana virus ini pertama kali ditemukannya di Wuhan, China. Pada akhir bulan Desember menjelang pergantian tahun tepatnya tanggal 31 Desember 2019, yang proses penyebaran virusnya sangat cepat sehingga lebih dari 118.000 kasus di 110 lebih negara dengan wilayah berbeda.

Pada tanggal 13 April 2020 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan pembatasan dalam bentuk kegiatan dan aktivitas di lingkungan masyarakat. Maka dikeluarkan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 mengenai tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan penerapan protokol kesehatan. Adanya program 4 (empat) M yang terdiri dari menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mencuci tangan.

Berdasarkan kebijakan tersebut membuat segala bentuk pembatasan setiap aktivitas dan kegiatan yang diluar rumah baik dalam bidang pendidikan, perekonomian bahkan sampai kegiatan agama. Terdapat kutipan dan berita yang dapat diambil oleh penulis dari internet [kompas.com](http://kompas.com) bahwa :

Terjadinya peningkatan penyebaran Covid-19 diduga sejak bulan lebaran yang diduga bukan hanya dari klaster Sumedang melainkan dari wilayah lain. Banyaknya masyarakat yang tidak taat dengan protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sumedang terkait penyebaran virus Covid-19 yang begitu cepat menyebarluas. Ditambah lagi dengan angka kasus COVID-19 terus meningkat di Provinsi Jawa Barat terkhususnya Kabupaten Sumedang.." Jelas Erwan selaku Wakil Bupati Sumedang, Kamis (5/5/2021).

(Sumber: [regionalkompas.com](http://regionalkompas.com). Diakses pada tanggal 11 September 2021).

## **1.2 Kesejangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dimana dalam situasi kondisi tersebut, sangat dibutuhkannya kinerja yang baik hingga maksimal dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumedang. Kinerja merupakan suatu penampilan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh personil dalam suatu organisasi. Dimana penampilan hasil dari pekerjaan tidak terbatas bagi yang

memangku jabatan struktural maupun fungsional tetapi juga kepada seluruh anggota personil yang ada di dalam organisasi dan juga merupakan hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan dari organisasi efisien serta kinerja keefektifan kinerja lainnya.

Kinerja dari Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) perlu dipersiapkan dalam mengatasi segala masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Terlebih saat ini sedang dilanda oleh virus yang sangat mematikan dan tak luput kinerja dari para aparaturnya dibantu adanya kesadaran yang baik dari masyarakat akan bahayanya pandemi yang terjadi saat ini.

Menurut saya sebagai penulis merasa bahwa kinerja dari aparaturnya aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumedang sangatlah dibutuhkan demi menciptakan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Sumedang. Dengan harapan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumedang mampu menghadapi dan menangani permasalahan terkait penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sumedang. Dimana wilayah Kabupaten Sumedang mencakup 26 kecamatan, 7 (tujuh) kelurahan dan 270 desa dengan luas wilayah 155.871,98 Ha serta jumlah penduduk 1.154.458 jiwa.

Berdasarkan sumber data yang didapat dari informan yang merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, Bambang Rianto S.STP.,M.Si untuk melaksanakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Sumedang. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti tidak memakai masker dengan benar, tidak menjaga jarak dan melakukan aktifitas lainnya yang bertentangan terhadap protokol kesehatan.

Mulai dari tanggal 17 Desember 2020 sampai tanggal 3 Juli 2021 terdapat 13.857 pelanggaran dengan total denda administrasi Rp.338.240.500. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 5 September 2021 terjadi sebanyak 714 pelanggaran dengan total denda administrasi Rp.28.137.000. Mulai dari bulan Desember 2020 hingga Awal Bulan September 2021 terjadi 14.571 pelanggaran dengan total biaya denda administrasi Rp.366.377.500. Dari banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat wilayah Kabupaten Sumedang maka masih perlunya ditingkatkannya kinerja dari Aparatur Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumedang.

Tidak mudah untuk menjalankan dan menegakkan peraturan yang dibuat oleh kepala daerah yang merupakan tugas utama dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Para aparaturnya dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sering menghadapi berbagai jenis masalah terlebih berhadapan langsung dengan masyarakat dari berbagai kalangan serta pendapat yang tidak sama memiliki kepentingan berbeda-beda bahkan

sampai terjadinya bentrok antara masyarakat dengan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Dimana beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumedang:

1. Cakupan wilayah kabupaten Sumedang yang cukup luas membuat kinerja dari aparat Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumedang jadi agak melambat.
2. Ditingkatkannya faktor pendukung baik sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumedang dalam penertiban protokol kesehatan.
3. Masyarakat juga membuat kinerja dari Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumedang kurang maksimal dimana kurangnya kesadaran dari diri masing-masing masyarakat untuk mematuhi peraturan protokol kesehatan.
4. Penertiban yang secara terjadwal dan rutin dilakukan oleh Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumedang baik secara lisan, tulisan dan sanksi berupa administrasi tidak membuat masyarakat jera. Sehingga perlu adanya ketegasan yang lebih tegas lagi dalam melaksanakan tugas untuk penertiban protokol kesehatan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam kinerja aparat maupun implementasi kebijakan publik oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Nadhifah Dwi Putri 2021), menemukan terdapat 5 aspek indikator produktivitas kinerja SATPOL-PP Jawa Timur yaitu, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, resposibilitas dan akuntabilitas. Penelitian Jufandi Wuri menemukan adanya 2 aspek tunggal yang difokuskan dalam tampilan kinerja pegawai dalam pelayanan publik, sistem pelayanan publik saat pandemic Covid-19, protokol pelayanan publik saat pandemic Covid-19. Yang berjudul Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19 (Jufandi Wuri, 2021). (Teopilus Surbakti dan Bertha Nellya, 2020) penelitian yang berjudul Kinerja SATPOL-PP Dalam Menata PKL Di Kabanjahe Kabupaten Karo) dimana dapat membuat sebuah pendaftaran berupa pendataan untuk relokasi tempat ke suatu tempat yang lebih memungkinkan. Penelitian yang berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian Pedagang Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang telah melaksanakan strategi dan kebijakan dari sebuah perumusan masalah, kebijakan, rekomendasi serta implementasi

kebijakan yang telah disetujui. Akan tetapi, melihat masyarakat dan pedagang yang belum menaati prosedur kesehatan. Sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dan rendahnya minat masyarakat di kota padang (Firmanda & Adnan, 2021). Pada penelitian yang berjudul analisis kinerja polisi pamong praja

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kinerja aparatur satuan polisi pamong praja dalam kegiatan penertiban protokol kesehatan berdasarkan faktor penghambat yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi. Metode yang digunakan berbeda dengan Nadhifah, Jufandi Wuri, Teopilus Surbakti. Selain itu pengukuran/indicator yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Agus Dwiyanto (2017:206) menyatakan teori dalam kinerja antara lain, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan teori implementasi kebijakan publik dalam penertiban menurut George C. Edward III (2020:154-158) antara lain, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terkait bagaimana kinerja, faktor apa saja yang menghambat, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang guna mengatasi permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penertiban protokol kesehatan dimasa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang.

## **II. METODE**

Penelitian ini dilakukan dalam menganalisis data hingga sampai hasilnya maka metode kualitatif ini menggunakan pendekatan induktif Sugiyono (2017:8). Penulis juga menetapkan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Deskriptif merupakan kegiatan penelitian yang akan dilakukan dengan mengamati bertujuan memberi gambaran secara keseluruhan mengenai karakteristik permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Pada penelitian deskriptif juga lebih menekankan pertanyaan dasar "bagaimana" dengan melakukan upaya untuk mendapatkan data-data, informasi yang lebih rinci dan teliti.

Penulis dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Penelitian, Kepala Bidang Seksi Penyidikan dan

Penyelidikan, Kepala Seksi Kerjasama, Pengelola Keamanan dan Ketertiban Seksi Operasional dan Pengendalian, serta 6 masyarakat Kabupaten Sumedang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Dimana penulis menggunakan pendapat dari Yadav yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1 Partisipasi dalam Perencanaan

Penulis melakukan pengukuran terhadap partisipasi dalam perencanaan kinerja aparatur satuan polisi pamong praja dalam kegiatan penertiban protokol kesehatan.

**Tabel 1**

**Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Menurut Kelompok Umur bulan Februari 2022**

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20	26	31	36	41	40	>50	
		s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d		
		25	30	35	40	45	50		
1	Kepala Satuan	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	1	-	-	3	5	9
3	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	-	-	1	-	-	2	-	3
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	1	2	3	3	14	6	29
5	Bidang Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	3	1	3	10	17
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	1	3	4
	<b>Total</b>	-	1	4	6	4	24	24	63

Sumber : Renstra Satuan Polisi Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Sumedang,2018-2023. Berdasarkan tabel 1 menjelaskan terkait jumlah pegawai berdasarkan kelompok umur per Februari 2022. Kewajiban yang harus dimiliki adalah kompetensi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang untuk menertibkan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat untuk

dapat tetap mematuhi setiap aturan terkait protokol kesehatan. Dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempengaruhi produktivitas kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Sumedang. Para aparatur yang saat berada pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Sumedang saat ini telah mengalami rotasi dan perubahan, sehingga membuat kinerja secara utuh belum terpenuhi secara maksimal. Menurut penulis selama berada di lapangan berdasarkan dari hasil observasi yang di dapat bahwa jumlah dari tenaga kontrak yang sangat banyak dan diantaranya juga masih banyak yang belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

### 3.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan

Penulis melakukan pengukuran terhadap partisipasi dalam pelaksanaan terkait kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban protokol kesehatan

**Tabel 2**

**Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Berdasarkan Golongan bulan Februari 2022**

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Satuan	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	4	3	9
3	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	-	1	1	1	3
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	18	9	1	29
5	Bidang Penanggulangan Kebakaran	-	5	9	3	17
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	-	-	4	-	4
<b>TOTAL</b>		1	26	27	9	63

Sumber : Renstra Satuan Polisi Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Sumedang,2018-2023.

Pada **Tabel 1** hanya ada seorang pimpinan dalam satu organisasi yang menjadi kepala satuan polisi pamong prajaserta pembagian jumlah

anggota dibawah stuktur organisasi yang dipimpin oleh kepala satuan polisi pamong praja. Pada **Tabel 2** penulis memperoleh data golongan yang dimiliki semua yang menjabat menjadi struktur organisasi yang ada di satuan polisi pamong praja. Bahwa golongan pekerjaan yang diemban didapat berdasarkan Pendidikan dan capaian yang telah dilalui, baik berupa Pendidikan tambahan dan sekolah tinggi lanjutan. Adanya dalam bidang tertentu yang memiliki keanggota dengan jumlah yang banyak sehingga dapat membuat pekerja dalam bidangnya menjadi lebih maksimal dalam menjalankan tugas penertiban protocol kesehatan. Sehingga protkol kesehatan yang selama ini dilakukan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil**

Penulis melakukan pengukuran terhadap partisipasi dalam pelaksanaan penertiban protocol kesehatan dengan memikirkan faktor penghambat yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi.

Dalam menentukan kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan dimesi produktivitas dengan indicator kompetensi aparatur, jumlah aparatur, sarana dan prasana, dimensi kualitas dengan indicator mempunyai SOP yang jelas dan kemudahan informasi, dimensi responsibilitas dengan indicator kepatuhan aparatur dan kesesuaian program, dimensi responsivitas dengan indicator tingkat kepuasan dan daya tangkap, dimensi akuntabilitas dengan indicator pertanggungjawaban aparatur dan taat dengann segala peraturan.

Implementasi kebijakan public dalam melaksanakan kegiatan penertiban protkol kesehatan dengan dimensi komunikasi dengan indicator kejelasan informasi, dimensi sumber daya dengan indicator sumber daya aparatur dan sumber daya anggaran, dimensi disposisi dengan indikaotr dukungan dari masyarakat, dimensi struktur birokrasi dengan indicator pembentukan tim.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan kegiatan penertiban protocol kesehatan selama masa pandemj Covid-19 banyak menimbulkan dampak positif dan dampak negative di lingkungan masyarakat. Namun seiring waktu berjalan masyarakat mendapatkan dampak positif dari penertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh aparatur satuan polisi pamong praja. Penulis menemukan temuan penting yakni dalam penertiban protocol kesehatan para aparatur satuan polisi pamong praja harus sabar dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan kegiatan penertiban sehingga masyarakat dapat menerima. Dari temuan hasil penelitian oleh Nadhifah terdapat 5 indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Penelitian Jufandi Wuri menemukan adanya 2 aspek tunggal yang difokuskan dalam tampilan kinerja pegawai dalam pelayanan publik, sistem pelayanan publik saat pandemic Covid-19, protokol pelayanan

publik saat pandemic Covid-19. Yang berjudul Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19 (Jufandi Wuri, 2021). (Teopilus Surbakti dan Bertha Nellya, 2020) penelitian yang berjudul Kinerja SATPOL-PP Dalam Menata PKL Di Kabanjahe Kabupaten Karo) dimana dapat membuat sebuah pendaftaran berupa pendataan untuk relokasi tempat ke suatu tempat yang lebih memungkinkan. Penelitian yang berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian Pedagang Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang telah melaksanakan strategi dan kebijakan dari sebuah perumusan masalah, kebijakan, rekomendasi serta implementasi kebijakan yang telah disetujui. Akan tetapi, melihat masyarakat dan pedagang yang belum menaati prosedur kesehatan. Sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dan rendahnya minat masyarakat di kota padang (Firmanda & Adnan, 2021). Pada penelitian yang berjudul analisis kinerja polisi pamong praja.

#### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis meneumakn faktor penghambat dalam penenganan penertiban protocol kesehatan, namun dengan berdarkan beberapa indicator yang telah ditemukan mampu mengatasi pemasalahan yang ada di lingkup masyarakat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas sudah berjalan dengan maksimal. Namun masih terdapat satu indikator kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang maksimal yaitu dari segi produktivitas dilihat dari kompetensi aparatur dan sarana prasana penertiban protokol kesehatan yang belum memadai. Melihat akan keterbatasan kompetensi sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan operasi penertiban terkhususnya penertiban protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan penertiban protokol kesehatan COVID-19 ini akan berjalan dalam waktu yang panjang dan penuh resiko, maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memberikan jaminan kesehatan kepada aparatur yang berstatus kontrak atau PPPK selama pelaksana penertiban protokol kesehatan COVID-19 berupa fasilitas tempat isolasi yang terkontaminasi COVID-19, santunan bagi aparatur yang mengalami kecelakaan bahkan juga yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan lokasi jarak tempuh untuk bisa sampai ke lokasi penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Agus Dwiyanto dan George Edward III.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh kaarena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kegiatan

penertiban protocol kesehatan di Kabupaten Sumedang untuk menemukan hasil yang mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Daftar Pustaka**

- Adiasmito, 2011. *Sistem Kesehatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agustino, L., 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, 2010. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Edisi Kedua. BPFE UGM Yogyakarta.
- Hasibuan, M., 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, 2017. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nazir, M., 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rudito, B., 2016. *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama
- Sedarmayanti, 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas kerja*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Silalahi, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Simangunsong, F., 2017. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak, P., 2011. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Simamora, S., 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIEY.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Widodo, S.E., 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Wibowo, 2017. *Manajemen Kinerja Edisi 5*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pencapaian Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19).

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (COVID-19).

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

### **C. Penelitian**

Dito, 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Universitas Panca Budi Medan. *Jurnal benefica* 5(2): 214-224.

Ferdy, 2020. "Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19. Universitas Muhammadiyah Malang. *Anterior jurnal* 19(2) : 114-122.

Matdio, 2019. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan". Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. *Jurnal Karya Ilmiah* 1(1) : 1-3.

Nadhifah, 2019. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur Dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19" Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

### **D. Website**

<https://regional.kompas.com/read/2021/05/20/175811478/setelah-lebaranhttps://regional.kompas.com/read/2021/05/20/175811478/setelah-lebaran-jumlah-kasus-covid-19-di-sumedang-meningkatjumlah-kasus-covid-19-di-sumedang-meningkat>. Diakses pada tanggal 11 September 2021 pukul 11.25.

### **E. Lain-Lain**

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, 2021. Jawa Barat Dalam Angka 2021.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang 2021. Jawa Barat Dalam Angka 2021.